

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan suatu entitas bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin, tapi juga bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup entitas (*going concern*). *Going concern* adalah kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan audit (SPAP, 1994 : 341.2). Menurut Setiawan (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007), *going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi, jika laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* berarti diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan pelaporan keuangan, nantinya auditor akan menilai apakah laporan keuangan telah memenuhi kepatuhan, menyajikan secara wajar, konsisten terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan apakah ada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan. Opini *going concern* merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas tersebut dimungkinkan mengalami masalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kelangsungan hidup suatu entitas selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen membawa satuan usaha tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidup entitas selama mungkin. Oleh karenanya, adalah wajar jika tuduhan pertama ditujukan kepada manajemen jika terdapat masalah *going concern*. *Going concern opinion* menggambarkan kondisi internal perusahaan yang sedang bermasalah. Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Praptitorini dan Januarti (2007), masalah *going concern* terbagi dua: pertama, masalah keuangan yang meliputi defisiensi likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana. Kedua, masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi trancam dan pengendalian yang lemah atas operasi.

Masalah *going concern* dapat dicegah dan diatasi dengan adanya suatu aturan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ini dikarenakan salah satu manfaat *Good Corporate Governance* adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2000) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus atau pengelola perusahaan, dan para pemegang saham. Untuk berhasil di pasar yang bersaing,

suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mengatur kegiatan perusahaan sehingga tercapai *Good Corporate Governance*.

Rekomendasi agar perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* juga untuk mengantisipasi masalah keagenan yang sering muncul dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya tersebar maupun yang terpusat. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap mekanisme *corporate governance* sebagai alat monitoring. Penelitian Lastanti (2004) menyatakan bahwa aktifitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini tentunya akan membantu perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dikemudian hari.

Pihak manajemen yang bertanggung jawab mengelola perusahaan juga terkadang memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Konflik kepentingan ini dapat diminimalisir dengan meningkatkan kepemilikan

manajerial. Harapan dari fungsi manajerial yang juga sebagai pemilik ini adalah bahwa manajer dalam menjalankan aktifitasnya akan lebih konsisten dengan kepentingan pemilik sehingga kinerja atau nilai perusahaan secara keseluruhan meningkat. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini pihak manajemen dapat merasakan manfaat atas pengambilan keputusan sekaligus menanggung konsekuensi atas kesalahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian Januarti (2008), opini audit *going concern* selain dipengaruhi informasi *financial* juga perlu mempertimbangkan informasi *non financial* seperti karakteristik kepemilikan perusahaan (manajerial dan institusional). Dengan adanya kepemilikan tersebut diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan perusahaan sehingga terhindar dari potensi terjadinya kesulitan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional dan manajerial, maka semakin efisien pemanfaatan keuangan perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* lain yang juga penting adalah keberadaan komisaris independen dan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam perusahaan. Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan

(*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000).

Pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan harus selalu dikaji secara berkala sehingga pelaksanaan *corporate governance* dapat berjalan sesuai konsep yang telah dirumuskan. Keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* pada perusahaan berfungsi untuk melakukan evaluasi dan mengkaji pelaksanaan *good governance* serta menjamin bahwa praktek-praktek tersebut telah dilaksanakan secara efektif (*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2004*). Pelaksanaan *corporate governance* yang terpantau secara berkala akan membantu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern* oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ballesta dan Garcia-Meca (2005) yang menguji peran *corporate governance* dalam audit eksternal di Spanyol. Mereka menggunakan variabel-variabel *corporate governance* seperti, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan anggota keluarga dalam dewan, dan ukuran dewan komisaris. Penelitian ini mereplikasi beberapa variabel yang digunakan

dalam penelitian tersebut, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini ditambahkan proporsi komisaris independen dalam Dewan Komisaris dan keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi penerimaan opini *going concern*.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah besarnya proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*?
2. Apakah besarnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*?
3. Apakah besarnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris suatu perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*?
4. Apakah keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh besarnya proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh besarnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris suatu perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh keberadaan komite kebijakan *corporate governance* dalam suatu perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada badan regulator untuk mempertimbangkan faktor yang dapat meningkatkan *corporate governance*.
 - b. Memberikan informasi kepada Komite Nasional Kebijakan Governance untuk merumuskan mekanisme *corporate governance* yang lebih baik untuk menunjang kelangsungan hidup perusahaan.
2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan secara khusus diharapkan dapat menambah wawasan tentang hubungan *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern*.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian serta hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data dari variabel penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, metode analisis dalam penelitian.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan serta pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Kemudian, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.